



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS KESEHATAN

Lakip

*Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2022*



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pertanggungjawaban Kepala Dinas kesehatan Kota Metro tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Metro telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Metro dalam merealisasikan visi dan misi yang merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 yang berupa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran yang ada yaitu : Tercapainya derajat kesehatan perorangan dan keluarga, Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Nilai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 terdiri dari 12 Indikator.

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,**
Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST.M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19720310 199703 1 006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kedudukan	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan	3
1.5 Isu Strategis Dinas Kesehatan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	14
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	15
3.3 Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.....	17
Kesehatan Kota Metro Tahun 2020,2021, dan 2022	
Grafik 3.2 Pencapaian Misi Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022.....	19
Grafik 3.3 Angka Kematian Bayi Kota Metro Tahun 2022.....	22
Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran.....	23
Kota Metro Tahun 2018 – 2022	
Grafik 3.5 Prevelensi Stunting di Kota Metro Tahun 2018 – 2022	25
Grafik 3.6 Grafik Succes Rate TB Kota Metro Tahun 2018 – 2022	27
Grafik 3.7 Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	28
Grafik 3.8 Grafik Persentase Obat Essensial Tahun 2018 – 2022	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan.....	3
Kota Metro Tahun 2021	
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi	4
Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022	
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan	9
& Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran OPD	
Tabel 2.2 Matrik Pembangunan RPJMN 2020 -2024	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Metro.....	11
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP.....	14
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro ...	15
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	16
Kota Metro Tahun 2022	
Tabel 3.3 Pencapaian Target Misi dan Sasaran Dinas Kesehatan	18
Kota Metro Tahun 2022	
Tabel 3.4 Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun Anggaran 2022..	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : PK-RKT Perubahan Tahun 2022
- Lampiran 2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022
- Lampiran 3 : Matrik RKPD Perubahan Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022
- Lampiran 4 : Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022
- Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2022
- Lampiran 6 : SOP Penyusunan SAKIP
- Lampiran 7 : Berita Acara Hasil Evaluasi Internal LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 8 : Prestasi Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dokumentasi
- Lampiran 9 : Dokumentasi Rapat Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro
- Lampiran 10 : Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Metro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *KEDUDUKAN*

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2003; pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan salah satunya di bidang kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1.2 *TUGAS POKOK DAN FUNGSI*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro pada Bab 2 pasal 3 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu “**Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan**”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Kesehatan
- c. Pembinaan Dan Fasilitasi Bidang Kesehatan Lingkup Kota Metro
- d. Pelaksanaan Tugas Di Bidang Promosi Kesehatan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Rujukan, Keluarga Dan Gizi, Dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Kesehatan
- f. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Program, Informasi, dan Humas;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Koordinator Kepegawaian, Umum dan Hukum
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari
 - 1) Sub Koordinator Substansi Pelayanan Kesehatan dan kesehatan tradisional\
 - 2) Sub Koordinator Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan
 - 3) Sub Koordinator Substansi mutu dan perizinan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Sub Koordinator Substansi Kefarmasian
 - 2) Sub Koordinator Substansi Alkes dan Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT)
 - 3) Sub Koordinator Substansi Sumber daya Kesehatan
- e. Bidang Pengendalian Penyakit
 - 1) Sub Koordinator Substansi Surveillance dan imunisasi
 - 2) Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 3) Sub Koordinator Substansi pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1) Sub Koordinator Substansi Kesehatan keluarga dan gizi
 - 2) Sub Koordinator Substansi Kesehatan lingkungan dan kesehatan olahraga
 - 3) Sub Koordinator Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1) UPTD Puskesmas Metro
- 2) UPTD Puskesmas Yosomulyo
- 3) UPTD Puskesmas Yosodadi
- 4) UPTD Puskesmas Iringmulyo
- 5) UPTD Puskesmas Tejo Agung
- 6) UPTD Puskesmas Margorejo
- 7) UPTD Puskesmas Mulyojati
- 8) UPTD Puskesmas Ganjar Agung
- 9) UPTD Puskesmas Purwosari
- 10) UPTD Puskesmas Karangrejo
- 11) UPTD Puskesmas Banjarsari
- 12) UPTD RSUD Jend. A.Yani
- 13) UPTD RSUD Sumbersari Bantul

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

Sampai dengan akhir tahun 2022 memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Metro terdiri dari: 11 Puskesmas yang sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan. Dari 11 puskesmas yang ada, 1 puskesmas diantaranya adalah puskesmas perawatan. Jumlah sarana kesehatan lainnya yaitu: 11 Pustu, 125 posyandu dan 137 poskesdel, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel.1.1 JUMLAH SARANA PRASARANA KESEHATAN
KOTA METRO TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH SARANA PRASARANA (Unit)				KET
		PUSKESMAS	PUSTU	POSYANDU	POSKESKEL	
1	Metro Pusat	2	1	44	9	1 rawat inap
2	Metro Timur	3	1	30	11	
3	Metro Utara	3	1	21	7	
4	Metro Barat	2	1	21	10	
5	Metro Selatan	1	1	9	12	
JUMLAH		11	5	125	137	

Data per-Desember 2022

Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Metro (termasuk puskesmas dan pustu) per 31 Desember 2022 berjumlah 399 orang ASN yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/ golongan sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS:399	S3 : 0	IV/d : 0	Ess IV = 12	Dokter Spesialis : 30
	S2 : 32	IV/c : 3	Ess III = 5	Dokter Umum : 63
	S1 : 133	IV/b : 4	Ess II = 1	Dokter Gigi : 19
	D4 : 60	IV/a : 22		Perawat : 275
	D3 : 155	III/d : 85		Perawat Gigi : 11
	D2 : 0	III/c : 60		Bidan : 120
	D1 : 0	III/b : 80		Ahli Gizi : 12
	SLTA : 15	III/a : 41		Sanitarian : 16
	SLTP : 0	II/d : 44		Apoteker : 25
	SD : 0	II/c : 41		Kesehatan Masyarakat : 8
	Lain-lain :	II/b : 2		Asisten Apoteker : 21
		II/a : 1		Analisis laboratorium : 29
		I/d : 0		Teknik Elektromedis : 4
		I/c : 0		Radiografer : 8
				Penata Anastesi : 6
				Fisioterapis : 7
				Perekam medis : 13

Ket: Pegawai Dinas Kesehatan termasuk pegawai RSUD, puskesmas dan pustu

1.5 *ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN*

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang nantinya akan dijadikan prioritas selama 5 tahun yang akan datang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Penetapan isu strategis ditentukan dari berbagai sumber, mulai dari internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, dan Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJP). Berikut adalah isu strategis yang ada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Metro:

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu di Kota Metro berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka Kematian Ibu di tahun 2021 yaitu 5 kematian, sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 0 kematian.

2) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Kota Metro tahun 2021 ada 10 kasus kematian, meningkat pada tahun 2022 menjadi 13 kasus kematian ada cenderung fluktuatif pada kematian bayi dari tahun 2018 meskipun masih dibawah target nasional.

3) Angka kematian balita

Angka kematian Balita di Kota Metro tahun 2021 yaitu 3 kematian, pada tahun 2022 yaitu 2 kematian.

4) Penyakit TB Paru

Penemuan kasus TB cenderung Fluktuatif. Tahun 2021 angka Penemuan kasus TB Paru di Kota Metro sebesar 363 kasus, pada tahun 2021 penemuan kasus TB naik menjadi 497 kasus. Dengan demikian permasalahan TB masih perlu di waspadai dan ditanggulangi oleh semua pihak.

5) Penyakit DBD

Kasus penyakit DBD di Kota Metro mengalami pasang surut dari tahun Tahun 2021 kasus DBD ada 138 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 88 kasus.

6) Penyakit HIV-AIDS

HIV-AIDS merupakan permasalahan kesehatan global. Di Kota Metro jumlah penderita HIV-AIDS Tahun 2022 ditemukan 27 kasus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya mendorong pembangunan di Kota Metro untuk mencapai visi dan misi Kota Metro adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Metro dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek- aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Metro.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kesehatan, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2021-2026 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

VISI & MISI

Dalam Rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021-2026 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Kota Metro. Adapun Visi Pemerintah Kota Metro sesuai dengan RPJMD periode 2021- 2026 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera,
dan Berbudaya.”**

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Berpendidikan : Kota Metro berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila.

Metro Sehat : Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani, dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa yang sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya, dan kerifan local. Metro sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong royong.

Metro Sejahtera : merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat dan juga diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian.

Metro Berbudaya : merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam upaya menuju visi tersebut, Kota metro menetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.**
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

4. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi kreatif.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Terhormat dan bermartabat.

Dinas Kesehatan Kota Metro mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi kedua yaitu ***Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial.***

TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah, serta dengan mempertimbangkan hasil telaah terhadap isu – isu strategi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan untuk periode tahun 2021-2026 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH). Sementara sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.2. Matrik Pembangunan RPJMN 2020 -2024

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas (PP)	Indikator	Target RPJMN					Target RPJMD Provinsi Lampung					Target RPJMD Kota Metro				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83	85	87	90	98	83	85	87	90	98	83,54	85	90	95	98
2	Kesehatan/ Program	Angka Harapan Hidup	71,52	71,61	71,88	71,90	71,99	70,65	70,73	70,99	71,00	71,2	71,63	71,76	71,90	72,04	72,18
3	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	230	217	205	194	183	85	75	70	65	60	5	3	3	3	2
4	dan upaya Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	15,4	14,6	13,2	12,4	11,3	4,64	4,64	4,36	4,36	4,01
5		Prevalensi Stunting pada Balita	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0	25,18	23,08	20,98	18,88	16,78	9,91	9,91	9,5	9	9
6		Angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
7		Persentase Puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	90%	91%	91,5%	92%	93%	90%	91%	91,5%	92%	93%	90%	91%	92%	93%	94%
8		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85%	90%	92%	94%	96%	85%	90%	92%	94%	96%	88%	90%	92%	94%	96%
9		Indeks Keluarga Sehat	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,20	0,22	0,27	0,35	0,35

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2022 antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Walikota Metro . Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2021 – 2026 yang telah dilakukan review. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Metro untuk mencapainya dalam Tahun 2022 Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kota Metro**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya upaya kesehatanperorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3
		Jumlah kasus kematian bayi	11
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,5%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%
2	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	92%
3	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%

4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,22%
---	---	-----------------------	-------

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Kesehatan Kota Metro mendapat dukungan anggaran sebesar 316.006.532.664 (senilai 213.499.833.316) merupakan anggaran pada kegiatan peningkatan pelayanan pada 11 puskesmas BLUD) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang terangkum dalam 5 program dan 18 kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1		3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5.	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

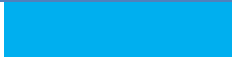



3.1 *Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022*

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode Warna
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	
3.	55% s.d 75%	Cukup (C)	
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)	

3.2 *Capaian Kinerja Tahun 2022*

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase JKN di dapat dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dengan perhitungan jumlah peserta yang dibayarkan pemerintah atau perorangan dibagi dengan total Jumlah penduduk. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
2	Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut didapat dengan memperhitungkan berbagai faktor diantaranya faktor sosial maupun ekonomi. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
3	Jumlah kasus kematian ibu	Jumlah kasus kematian ibu merupakan kasus kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
4	Jumlah kasus kematian bayi	Jumlah kasus kematian bayi merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai satu tahun. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
5	Prevalensi stunting pada anak Balita	Prevalensi stunting dihitung dengan melihat tinggi badan anak balita yang diukur pada saat melakukan posyandu. Perhitungan prevalensi stunting dihitung dengan cara banyaknya anak balita yang mengalami stunting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur TB nya dikali dengan 100 persen. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
6	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yaitu semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
7	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah tenaga yang memiliki kesesuaian pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.

8	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Obat esensial merupakan obat yang harus ada di fasilitas kesehatan dan memenuhi standar ketersediaan obat esensial di Puskesmas. Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.
9	Indeks keluarga Sehat	Indeks keluarga Sehat dihitung dengan cara merekapitulasikan data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi 3 dengan Klasifikasi Keluarga Sehat (IKS> 0,800) , Keluarga Pra Sehat (IKS =0,500-0,800) , dan Keluarah Tidak Sehat (IKS <0,500). Persentase IKU dihitung dengan cara target dibagi dengan realisasi dikali 100 persen.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Metro juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

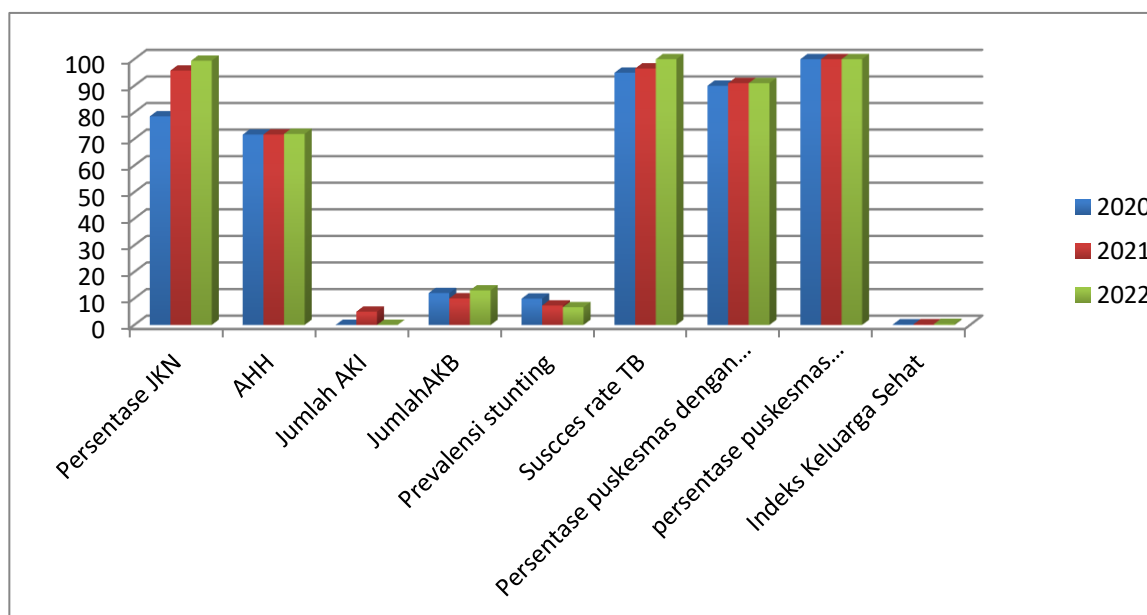
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90,0%	99,41%	110,5%	
2	Angka Harapan Hidup	71,90	71,88	99,9%	
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	3	0	0	Tidak ada kasus kematian ibu
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	11	13	84,61%	
5	Prevalensi Stunting pada Anak Balita	9,5%	6,67%	142%	
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TBC) (<i>suscces rate</i>)	95%	100%	105%	
7	Prevalensi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	92%	92%	100%	
8	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	92%	100%	103%	
9	Indeks Keluarga Sehat	0,27	0,376	139%	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 9 indikator terdapat 6 indikator yang sudah melebihi target 100% dan 3 indikator dengan rentang capaian 75%-100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2020, 2021, dan 2022



Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa untuk realisasi dari 9 indikator, yaitu:

- (1) Indikator persentase JKN tahun 2022 (99,41%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (78,5%) dan 2021 (95,72%) dengan *ukuran keberhasilan kinerja* jika realisasi lebih tinggi dari target atau dari tahun sebelumnya;
- (2) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan angka sesuai target dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
- (3) Indikator jumlah kasus kematian ibu menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 0 kasus dari tahun 2021 berjumlah 5 kasus. Jumlah kasus kematian ibu memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai dengan renstra.
- (4) Indikator jumlah kasus kematian bayi tahun 2022 terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu ada 13 kasus kematian bayi, sedangkan tahun 2021 ada 10 kasus dan tahun 2020 ada 12 kasus sehingga tidak memenuhi target capaian.
- (5) Indikator prevalensi stunting pada balita tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang semula 7,3 % menjadi 6,67%. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (6) Indikator Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*success rate*) tahun 2022

(100%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (94,9%) dan 2021 (96,5%). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.

(7) Indikator persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2022 (91%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2021 (91%) dan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 (90%).

(8) Indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2022 (100%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2021 (100%) dan tahun 2020. Hal ini sudah memenuhi target capaian.

(9) Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2022 (0,376) menunjukkan peningkatannya dari tahun 2020 (0,23) dan tahun 2021 (0,376). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.

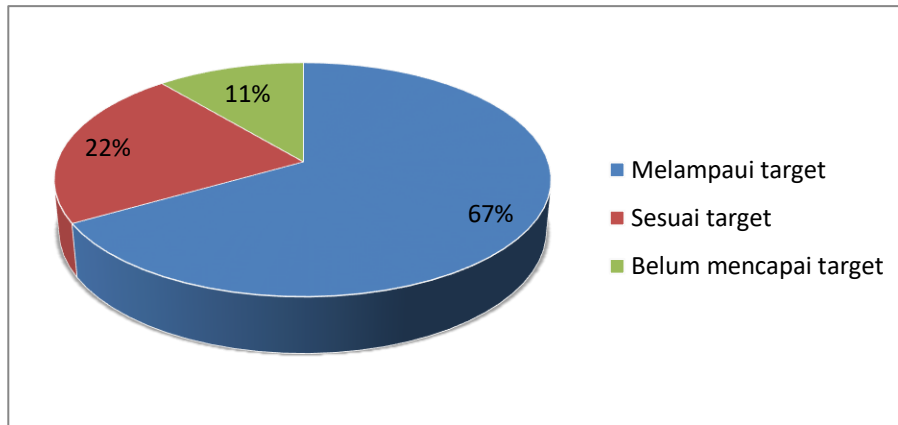
Secara umum Dinas Kesehatan Kota Metro telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Target Misi Dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022

NO	MISI	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Misi 2	Waras : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial.	9	6	66,67	2	22,2	1	11,1
		JUMLAH	9	6	66,67	2	22,2	1	11,1

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk pencapaian Misi ke-2 dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan dengan jumlah indikator sasaran sebanyak 9 indikator : 5 indikator melebihi target (55,55%), 3 indikator sesuai target (33,3%) dan 1 indikator belum mencapai target (1,11%). Pencapaian Misi Dinas Kesehatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2 Pencapaian Misi
Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022



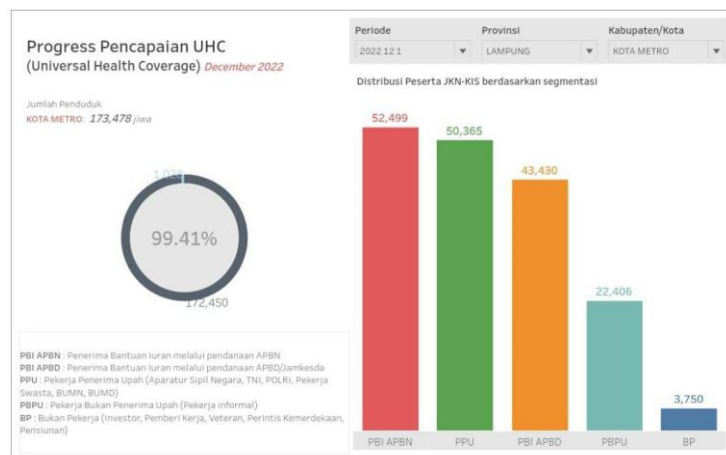
Rincian pencapaian indikator kinerja pada misi ke-2 Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dan sosial terdiri dari 1 sasaran dengan 7 indikator sasaran yang akan dicapai, antara sebagai berikut :

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Metro yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan, pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dengan 9 indikator sasaran antara lain:

1. Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2022 sudah mencapai target yaitu realisasinya sebesar 99,41% dengan target 90%. Hal ini sudah memenuhi capaian target sebesar 110,5%. Dalam pelaksanaannya banyak peserta BPJS yang masih dibebankan ke pmda sehingga dana dikhawatirkan kurang, maka dari itu solusi yang diberikan adalah penarikan kepesertaan ke PBI APBN dan Jamkes Prov dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.



Pencapaian UHC Kota Metro tahun 2022

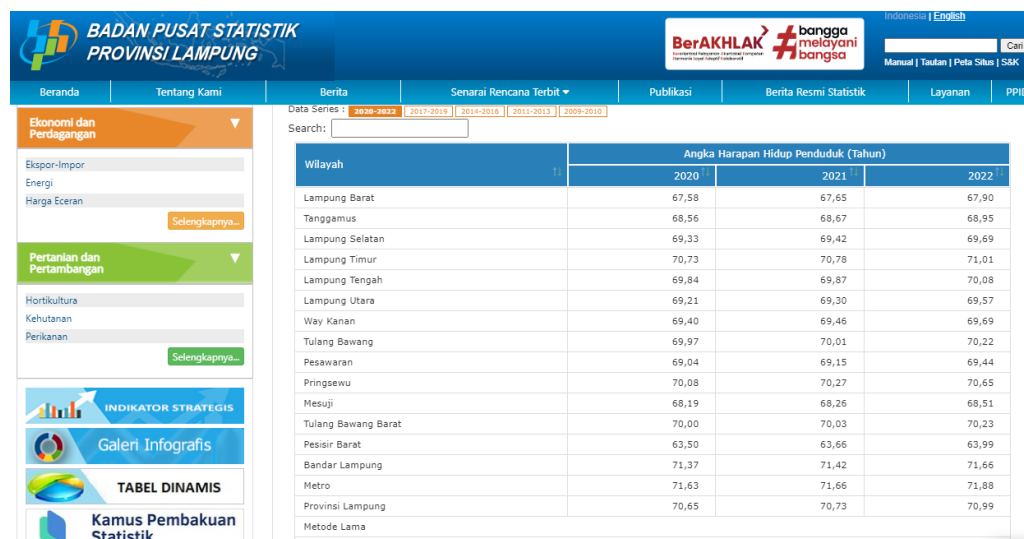
2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena

hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik baik secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada terjaminnya kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kota Metro tahun 2022 yaitu 71,88 tahun. Angka harapan Hidup terus meningkat setiap tahunnya.



The screenshot shows the official website of the Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. The page features a navigation menu with options like 'Beranda', 'Tentang Kami', 'Berita', 'Senarai Rencana Terbit', 'Publikasi', 'Berita Resmi Statistik', 'Layanan', and 'PPID'. A sidebar on the left contains various categories such as 'Ekonomi dan Perdagangan', 'Pertanian dan Pertambangan', and 'Indikator Strategis'. The main content area displays a table titled 'Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)' (Life Expectancy of the Population in Years) for the year 2022. The table lists various regions (Wilayah) and their corresponding life expectancy values for 2020, 2021, and 2022.

Wilayah	Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)		
	2020	2021	2022
Lampung Barat	67,58	67,65	67,90
Tanggaman	68,56	68,67	68,95
Lampung Selatan	69,33	69,42	69,69
Lampung Timur	70,73	70,78	71,01
Lampung Tengah	69,84	69,87	70,08
Lampung Utara	69,21	69,30	69,57
Way Kanan	69,40	69,46	69,69
Tulang Bawang	69,97	70,01	70,22
Pesawaran	69,04	69,15	69,44
Pringsewu	70,08	70,27	70,65
Mesuji	68,19	68,26	68,51
Tulang Bawang Barat	70,00	70,03	70,23
Pesisir Barat	63,50	63,66	63,99
Bandar Lampung	71,37	71,42	71,66
Metro	71,63	71,66	71,88
Provinsi Lampung	70,65	70,73	70,99
Metode Lama			

Sumber : Website BPS Provinsi Lampung

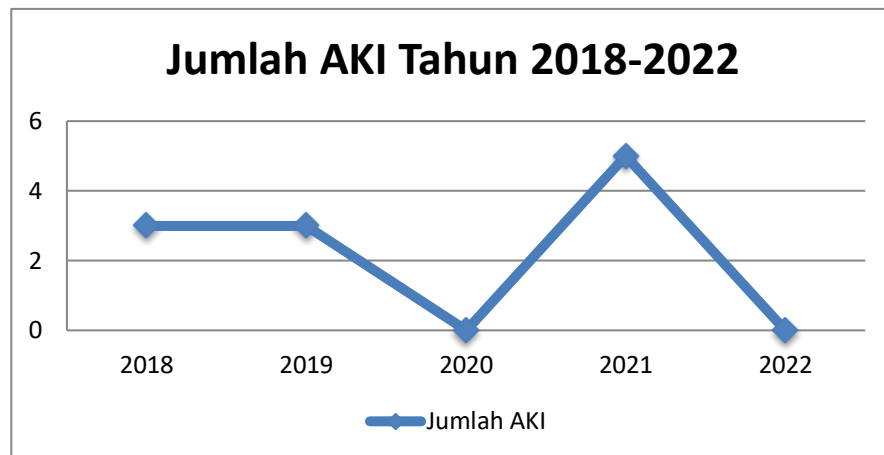
3. Jumlah Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu merupakan cermin status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Untuk jumlah kasus kematian ibu maternal selama kurun waktu tahun 2018-2022 berfluktuasi namun cenderung menurun seperti tampak pada gambar berikut:

Grafik 3.3 Angka kematian bayi Kota Metro tahun 2018-2022



Jumlah kematian ibu pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3 kasus, tahun 2020 tidak ada kematian ibu, tahun 2021 meningkat kembali menjadi 5 kasus dan pada tahun 2022 kembali menjadi 0 kasus tidak ada kasus kematian ibu.

Capaian kinerja kasus kematian ibu pada tahun 2022 sudah sesuai target karena tidak ada kasus kematian ibu. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika realisasinya ada dibawah target. Faktor pendorong tercapainya target ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu, antara lain:

- 1) Inovasi JAMAPAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
- 2) Kelas rutin Ibu Hamil di posyandu
- 3) Meningkatkan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)



Kegiatan P4K tahun 2022



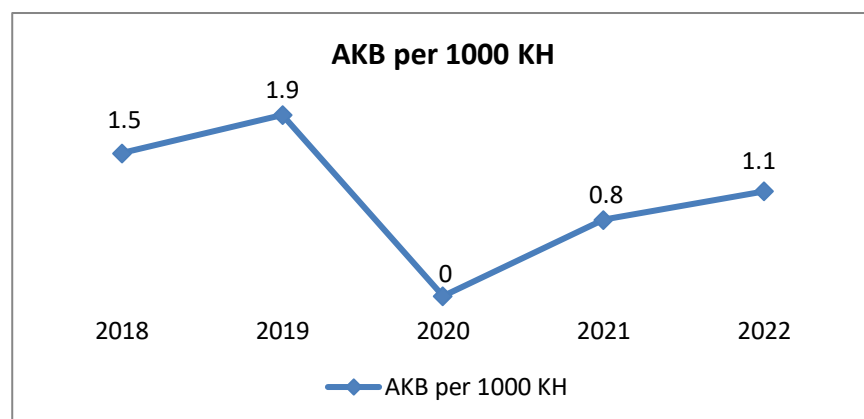
Kegiatan kelas ibu hamil tahun 2022

4. Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi. AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022), Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Metro berfluktuasi, pada tahun 2018 sebesar 1,5 (4/2654), tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,9 (5/2620) , pada tahun 2020 tidak ada kematian bayi (0/2358) , tahun 2021 naik kembali sebesar 0,8 (2/2409), dan pada tahun 2022 sebesar 1,1 (3/2533). angka kematian bayi cenderung fluktuatif seperti tampak pada gambar berikut:

Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Kota Metro tahun 2018-2022



Sumber: Seksi Kesga dan gizi Dinas Kesehatan Kota Metro

Kasus kematian bayi tahun 2022 sebanyak 3 kasus yang disebabkan oleh afiksia, BBLR, dan prematur.

Capaian kinerja kasus kematian bayi sebesar 1,1 (3/2533). Faktor pendukung capaian targer ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi , antara lain :

- 1) Kunjungan neonatus;
- 2) Kujungan pada bayi yang sakit;
- 3) dan posyandu yang rutin dilakukan setiap bulan.



Kegiatan Kunjungan neonotus



Kegiatan posyandu rutin

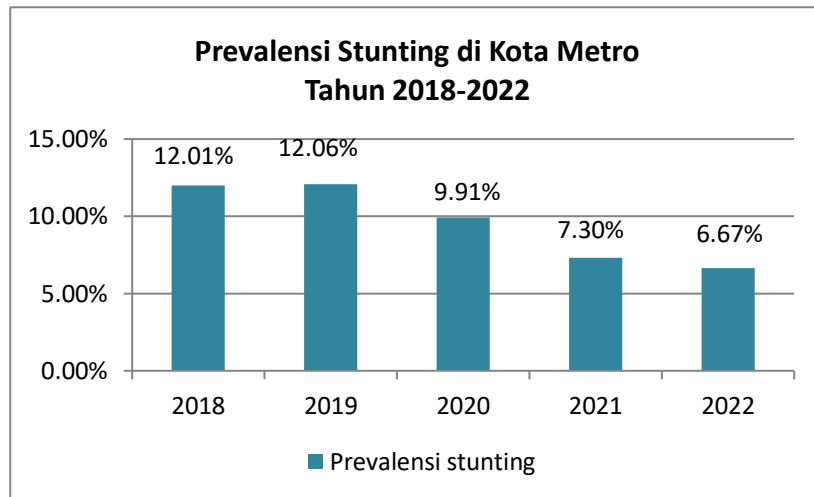
5. Prevalensi stunting pada anak Balita

Stunting menggambarkan suatu keadaan malnutrisi yang kronis dan anak memerlukan waktu untuk berkembang serta pulih kembali menuju keadaan tinggi badan anak yang normal menurut usianya. Prevalensi stunting yang tinggi di dunia maupun di Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan stunting banyak mendapat perhatian sebagai masalah kekurangan gizi kronis dalam bentuk anak pendek. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya perkembangan kemampuan motorik dan mental anak. maka dari itu perlunya angka penurunan stunting di Indonesia.

Salah satu indikator pemantauan pertumbuhan balita adalah dengan melihat partisipasi masyarakat terhadap bayi yang datang ditimbang (D/S). Balita ditimbang adalah jumlah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di Posyandu dan tempat penimbangan balita. Balita Pendek adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi.

Prevalensi stunting menjadi salah satu isu strategis yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Metro. Berikut adalah grafik prevalensi stunting di Kota Metro selama 5 tahun terakhir.

Grafik 3.5 Prevalensi Stunting di Kota Metro Tahun 2018 – 2022



Sumber : Sie kesga dan gizi Dinas Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penurunan angka stunting yaitu diantaranya memulai pencegahan dari remaja putri, catin (calon pengantin), ibu hamil yang mengalami KEK hingga pada bayi yang sudah lahir. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya stunting di Kota Metro :

- 1) Pemantauan pertumbuhan
- 2) Pemberian Vitamin A
- 3) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada rematri (remaja putri)
- 4) Pemberian PMT pada balita gizi kurang dan Bumil KEK
- 5) Penyuluhan dan Sosialisasi PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak)
- 6) Kunjungan rumah balita gizi kurang dan IMD

Namun masih terdapat kurangnya kesadaran ibu balita terhadap pentingnya pemantauan pertumbuhan balita





Pemantauan pertumbuhan di posyandu



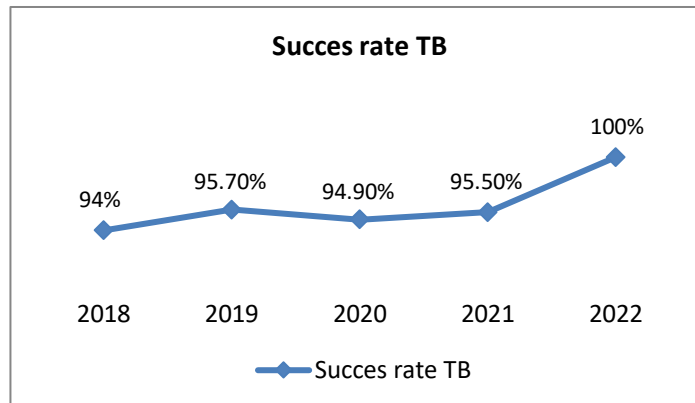
Pemberian PMT pada balita Gizi Kurang dan Bumil KEK

6. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)

Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis mempresentasikan tentang kejadian kasus tuberkulosis yang diobati. Jika persentase semakin besar maka akan semakin baik cakupan penyembuhan tuberkulosis.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka berhasil tuberkulosis cenderung meningkat. Angka keberhasilan pengobatan (succses rate) TB tahun 2018 94 %, tahun 2019 succes rate TB 95,7 %. Tahun 2020 menurun menjadi 94,9 %, tahun 2021 meningkat menjadi 96,5 %, dan tahun 2022 ini menjadi 100 %.

Grafik 3.6 Grafik Succes Rate TB Kota Metro Tahun 2018 – 2022



Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis ini didukung dengan berbagai kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan investigasi kontak
- 2) Inovasi penemuan suspek TBC yaitu JAMOU TB (Jaring Aktif, Mobilisasi TB, Tuntaskan Tuberkulosis)
- 3) GENCAR ENDUS TB (Gerakan Pencarian Penderita dan Suspek TB)
- 4) Tersedianya logistik catridge TCM sebagai alat diagnosis TBC
- 5) Tersedianya logistik OAT dan Non OAT



Kegiatan JAMOU TB oleh sub koor P2



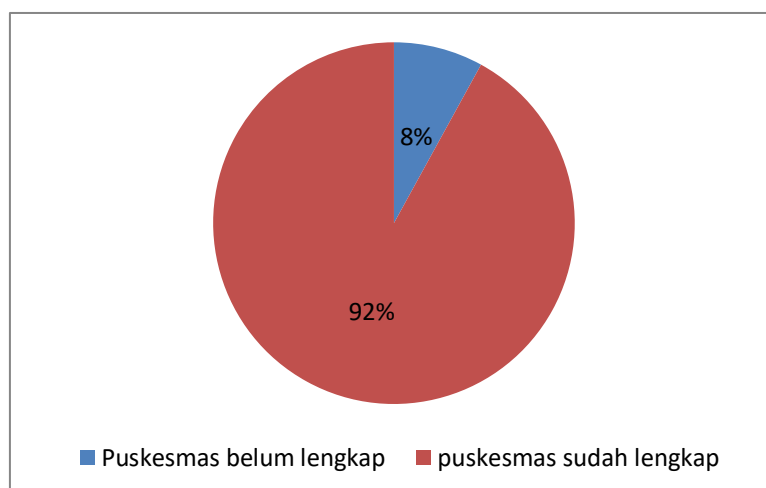
Kegiatan GENCAR ENDUS TB oleh sub koor P2

7. Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Puskesmas Mempunyai 9 Jenis Tenaga Kesehatan adalah Puskesmas yang minimal telah memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM (ahli teknologi laboratorium medik), apoteker, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.

Jumlah persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 mencapai 92 % , kota metro memiliki 11 puskesmas di wilayah kerjanya dari 11 puskesmas tersebut terdapat 10 puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar dan terdapat 1 puskesmas yang belum lengkap terlihat pada tabel berikut.

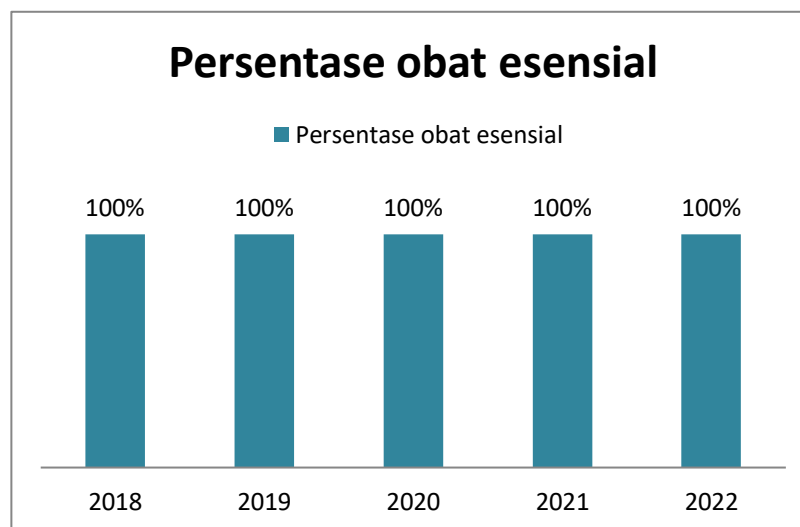
Grafik 3.7 Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar



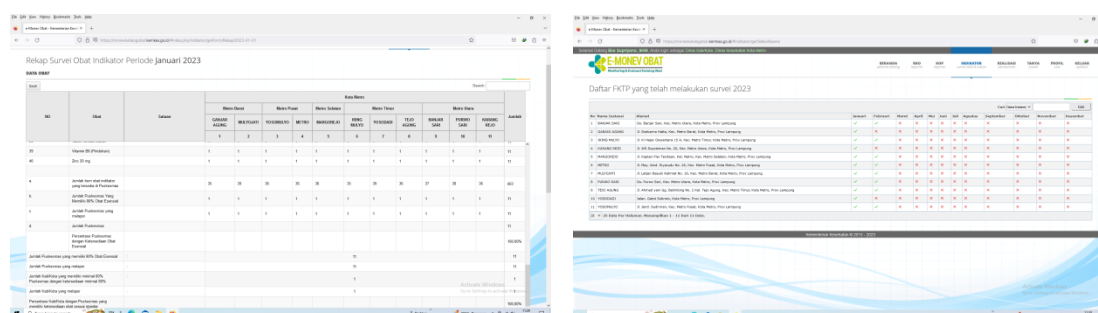
8. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling mendasar dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang harus tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai fungsi dan tingkatnya. Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bahwa ketersediaan obat sesuai kebutuhan dasar paling tidak sekitar 90%. Pengelolaan obat yang fleksibel bisa menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan harga obat, khususnya obat esensial pada sarana kesehatan dasar. Ketersediaan obat sangat menentukan efektifitas pengobatan pada sarana kesehatan pemerintah. Ketersediaan obat esensial merupakan salah satu isu strategis yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Metro. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sesuai standar bisa dilihat dengan grafik dibawah ini.

Grafik 3.8 Grafik Persentase Obat Essensial Tahun 2018 – 2022



Grafik diatas menunjukkan cakupan ketersediaan obat esensial sudah terpenuhi yaitu sebesar 100%. Pengisian ketersediaan obat esensial ini dilakukan diaplikasi SELENA (sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.



Aplikasi selena dan e money obat

9. Indeks keluarga sehat

IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500$ $0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$.

Proram Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga, Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan seluruh program di Puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya program indonesia sehat

Indeks Keluarga Sehat	2020	2021	2022
Kota Metro	0,17	0,23	0,38

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan IKS, Antara lain :

- 1) Meningkatkan Manajemen Pendekatan keluarga terintegrasi dengan manajemen Puskesmas yang dilakukan mulai dari proses perencanaan (P1), pergerakan pelaksanaan (P2) sampai proses pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3). Langkah pertama adalah Persiapan yang didalamnya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pengorganisasian.
- 2) Meningkatnya jumlah kunjungan Pembina Keluarga melakukan kunjungan rumah (Intervensi PIS-PK) keluarga menggunakan formulir Prokesga (tercetak/manual) dan elektronik (aplikasi keluarga sehat) serta promosi kesehatan dengan menggunakan pinkesga.
- 3) Telah dilakukan workshop bagi pengelola program PIS PK di Puskesmas untuk menghitung Indeks Keluarga Sehat (IKS) serta melakukan analisis data menggunakan aplikasi Inarata, SPSS dan manual dengan raw data.
- 4) Kemudian Pembina Keluarga melakukan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah dalam upaya intervensi masalah kesehatan dari hasil analisis sesuai kemampuan dan kewenangannya dan juga melaksanakan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM.
- 5) Peningkatan Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Metro Tahun 2022 Sebesar 96.24%.
- 6) Deklarasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK.
- 7) Terdapat program inovasi di puskesmas yang mendukung untuk peningkatan IKS pada indikator PIS PK diantaranya GERTAK PAPI (Gerakan Serentak Pengobatan pasar Pagi),GEROBAK CEPER (Gerakan Posbindu Keliling Untuk Cegah Penyakit Tidak Menular), Gercep Tilar Madu Karim (Gerakan Pencegahan penyakit

Tidak Menular dan Masyarakat Peduli Kanker Leher Rahim), Posbindu Mobile, KUNTJI (Kunjungan Rutin Gangguan Jiwa), OKE TB, Program HOMECARE, Laskar Waras, TTM (Teman TBC Masyarakat).



Dokumentasi pertemuan Koordinasi Teknis PIS-PK terintegrasi program tahun 2022



Dokumentasi kegiatan intervensi keluarga tahun 2022

Namun ada beberapa factor penghambat dalam peningkatan IKS diantaranya :

1. Perbedaan Data KK yang berbeda antara BPS, Disdukcapil dan real di lapangan
2. Mobilisasi keluarga yang tinggi, saat melaksanakan kunjungan rumah dan intervensi rumah yang dikunjungi tidak ada di rumah, karena pada umumnya masyarakat disini pagi atau siang sedang bekerja di sawah dan kebun atau di pasar.
3. Tingginya jumlah anggota keluarga yang merokok sehingga pada indikator keluarga sehat nomor 9 masih rendah capaiannya.

Integrasi program UKM dan PISPK belum berjalan maksimal

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Metro
Tahun Anggaran 2022

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.308.732.204	269.575.621.049	98%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.674.000	127.993.630	99%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.200.000	56.135.220	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.000.000	26.941.340	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.474.000	44.917.070	99%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.759.489.671	59.358.049.509	99%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.021.065.671	55.675.656.968	99%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.719.924.000	3.673.973.441	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500.000	12.420.000	99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	6.000.000	5.999.100	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	243.182.700	240.821.000	99%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.058.600	25.941.900	100%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.100.000	46.993.600	98%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	149.216.700	99%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.024.100	18.668.800	98%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.143.000	233.739.531	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.383.000	18.356.000	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.291.000	75.059.280	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.335.000	37.331.300	100%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.400.000	43.280.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.734.000	59.712.951	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.099.517	155.382.367	95%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.099.517	149.382.367	90%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	213.499.833.316	209.216.794.210	97%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	213.499.833.316	209.216.794.210	97%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.310.000	242.840.802	78%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.970.000	57.098.598	82%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.960.000	133.977.304	89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.700.000	15.600.000	99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.680.000	26.164.900	98%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	217.003.844.998,69	208.594.101.222,00	96%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.887.311.820	7.591.891.483,50	98%
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	826.526.000	796.448.830	96%
	Pengembangan Puskesmas	50.000.000	49.787.620	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.484.106.0000	2.261.932.606	91%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	83.850.000	83.756.000	100%
	Pengadaan Obat, Vaksin	3.851.475.820	3.813.527.819,50	99%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	591.354.000	586.438.608	98 %
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	216.419.796.898,69	208.015.489.634	96,1%

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.750.000	41.933.960	94 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	124.815.000	40.208.800	32 %
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.900.000	15.805.000	78%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000	48.453.275	90%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.170.800	25.665.800	82%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.885.000	19.082.800	83%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38.310.000	38.219.367	94%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	140.000.000	135.378.700	97%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.000.000	25.393.800	91%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34.999.800	31.231.000	89%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	136.150.600	125.770.650	92%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.915.000	30.713.750	99%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.807.000	82.412.900	83%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.050.000	17.758.000	98%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	61.248.000	61.005.950	100%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	90.000.000	89.656.050	100%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76.000.000	73.447.100	97%
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	89.200.500	88.847.200	100%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.422.221.600	17.605.847.200	91%
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	22.918.000	22.918.000	100%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.474.000.000	1.404.265.509	95%
	Operasional Pelayanan Dinas Kesehatan & Operasional Puskesmas	8.428.500.000	7.778.604.453	92%
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	110.000.000	98.609.825	90%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	446.124.000	25.000.000	6%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	121.671.000	117.993.608	96%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	75.000.000	74.175.000	99%

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	46.671.000	43.818.608	94%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462.377.100	460.617.980	99%
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	382.337.100	381.086.160	99%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	15.190.000	15.108.600	99%
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	64.850.000	64.423.220	99%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	98.974.600	98.614.200	99%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50.281.000	49.921.000	99%
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	24.517.800	24.157.800	99%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.763.200	25.763.200	100%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.693.600	48.693.200	100%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.693.600	48.693.200	100%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	226.450.700	214.434.400	94,7%
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	199.450.700	187.570.700	94%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	199.450.700	187.570.700	94%

	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	27.000.000	26.863.700	99%
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	27.000.000	26.863.700	99%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.843.049.940	1.835.082.100	99%
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	415.509.940	415.287.100	100%
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	415.509.940	415.287.100	100%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.540.000	28.843.000	79%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36.540.000	28.843.000	79%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.391.000.000	1.390.952.000	100%
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.391.000.000	1.390.952.000	100%
	JUMLAH	316.006.532.664,00	307.829.483.910,04	97%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2022 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena dari 6 indikator yang terdapat pada sasaran strategis terdapat 1 indikator (16,67%) melebihi target 100% dan 4 indikator (66,66%) sesuai target 100%, hanya 1 indikator (16,67) yang belum mencapai target 100%, antara lain yaitu:

- (1) Indikator persentase JKN tahun 2022 (99,41%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (78,5%) dan 2021 (95,72%) dengan *ukuran keberhasilan kinerja* jika realisasi lebih tinggi dari target atau dari tahun sebelumnya;
- (2) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kenaikan angka sesuai target dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
- (3) Indikator jumlah kasus kematian ibu menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 0 kasus dari tahun 2021 berjumlah 5 kasus. Jumlah kasus kematian ibu memenuhi target yang sudah ditentukan sesuai dengan renstra.
- (4) Indikator jumlah kasus kematian bayi tahun 2022 terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu ada 13 kasus kematian bayi, sedangkan tahun 2021 ada 10 kasus dan tahun 2020 ada 12 kasus sehingga tidak memenuhi target capaian.
- (5) Indikator prevalensi stunting pada balita tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang semula 7,3 % menjadi 6,67%. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (6) Indikator Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*success rate*) tahun 2022 (100%) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 (94,9%) dan 2021 (96,5%). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.
- (7) Indikator persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar tahun 2022 (91%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2021 (91%) dan cenderung

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 (90%).

- (8) Indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2022 (100%) menunjukkan kesamaan dengan realisasi tahun 2021 (100%) dan tahun 2020. Hal ini sudah memenuhi target capaian.
- (9) Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2022 (0,376) menunjukkan peningkatannya dari tahun 2020 (0,23) dan tahun 2021 (0,376). Hal ini menunjukkan terpenuhinya target capaian.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Telp. (0725) 44454 Metro, Fax. (0725) 43531

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. ERLA ANDRIANTI, MARS
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : WAHDI
Jabatan : Walikota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

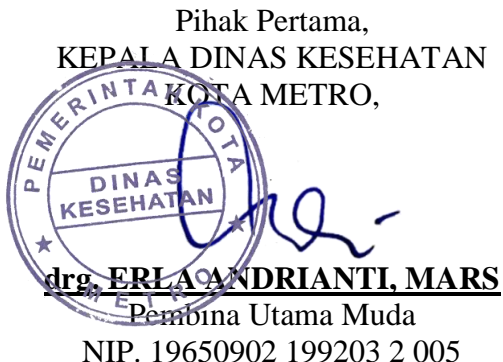
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro,

2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA METRO

WAHDI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,

drg. ERLA ANDRIANTI, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 199203 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

OPD DINAS KESEHATAN KOTA METRO

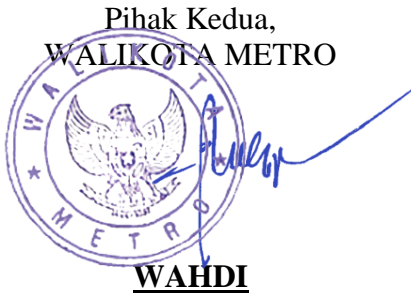
No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Program	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3 kematian	3 kematian
		Jumlah kasus kematian bayi	11 kematian	11 kematian
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,5%	9,5%
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%	95%
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	100%	100%
2	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	92%	92%
3	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%	92%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,27	0,27
5	Terpenuhinya administrasi dan program penunjang perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%

Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	226.432.415.784,-	274.308.582.204,-	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	44.412.610.650,-	38.610.075.220,-	APBD, DAK, BLUD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	110.000.000,-	98.974.600,-	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	135.000.000,-	125.860.000,-	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.851.109.940,-	1.843.049.940,-	APBD
JUMLAH	272.941.136.374,-	314.986.541.964,-	

Metro,

2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA METRO



WAHDI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,



drg. EREA ANDRIANTI, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19650902 199203 2 005



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Telp. (0725) 44454 Metro, Fax. (0725) 43531

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN

OPD : Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran : 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA RENSTRA DAN PROGRAM	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3	3
	Jumlah kasus kematian bayi	11	11
	Prevalensi stunting pada anak balita	9,5%	9,5%
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>success rate</i>)	95%	95%
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	100%	100%
Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	92%	92%
Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%	92%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,27	0,27
Terpenuhinya administrasi dan program penunjang perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%

Metro, 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,



drg. ERLA ANDRIANTI, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19650902 199203 2 005

MATRIK RKPD PERUBAHAN
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA METRO

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2022				PERUBAHAN APBD 2022			
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
1		2	3	4	5	6	7	8		
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			272.941.136.374,00			316.006.532.664,00		
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	12 bulan	226.432.415.784,00	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	12 bulan	274.308.732.204,00		
1 02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	146.974.000,00	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	128.674.000,00		
1 02 01 2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	59.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	56.200.000,00		
1 02 01 2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 dokumen	27.000.000,00	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 dokumen	27.000.000,00		
1 02 01 2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	60.974.000,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	45.474.000,00		
1 02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	57.758.768.359,00	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	59.759.489.671,00		
1 02 01 2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	53.947.948.359,00	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	56.021.065.671,00		
1 02 01 2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	3.792.320.000,00	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	3.719.924.000,00		
1 02 01 2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1 dokumen	12.500.000,00	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1 dokumen	12.500.000,00		
1 02 01 2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	6.000.000,00	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	6.000.000,00		
1 02 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	343.577.400,00	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	243.182.700,00		
1 02 01 2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	150 orang	33.577.400,00	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	150 orang	26.058.600,00		

1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	9 orang	50.000.000,00	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	9 orang	48.100.000,00
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 orang	240.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	525 orang	150.000.000,00
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	41 orang	20.000.000,00	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	41 orang	19.024.100,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	249.515.500,00	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	234.143.000,00
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	18.383.000,00	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	18.383.000,00
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	79.998.500,00	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	75.291.000,00
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	38.000.000,00	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	37.335.000,00
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	53.400.000,00	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	43.400.000,00
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	59.734.000,00	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	59.734.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penujangan urusan pemerintah daerah	12 bulan	146.999.517,00	Cakupan penyediaan jasa penujangan urusan pemerintah daerah	12 bulan	171.099.517,00
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	600 lembar	6.000.000,00	Jumlah materi	600 lembar	6.000.000,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	140.999.517,00	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	165.099.517,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang-barang milik daerah	12 bulan	265.310.000,00	Cakupan pemeliharaan barang-barang milik daerah	12 bulan	272.310.000,00
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	69.970.000,00	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	69.970.000,00
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 bulan	149.960.000,00	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	12 bulan	149.960.000,00
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2 jenis	10.000.000,00	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2 jenis	10.000.000,00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	10.700.000,00	Cakupan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	15.700.000,00

1 02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	12 bulan	24.680.000,00	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	12 bulan	26.680.000,00
1 02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan operasional pelayanan BLUD	12 bulan	167.521.271.008,00	Cakupan operasional pelayanan BLUD	12 bulan	213.499.833.316,00
1 02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	167.521.271.008,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	213.499.833.316,00
				Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	752.215.500,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	835.527.051,00
				Puskesmas Metro	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.080.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.183.345.691,00
				Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.123.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.451.252.272,00
				Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	630.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	777.025.803,00
				Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	916.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.047.822.598,00
				Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	495.890.500,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	631.556.664,00
				Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	391.943.343,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	514.118.797,00
				Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	451.587.047,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	632.691.447,00
				Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	284.124.098,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	434.946.059,00
				Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	546.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	604.865.880,00
				Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	760.510.520,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	889.828.993,00
				RSUD Jend. A Yani	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	160.000.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	203.591.714.029,00
				RSUD Sumber Sari Bantul	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	90.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	905.138.032,00
1 02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	71,9 tahun	44.412.610.650,00	Angka Harapan Hidup	71,9 tahun	39.529.325.220,00
1 02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	10.105.518.600,00	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	7.887.311.820,00
1 02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RSUD mendapat pembangunan beserta sarana dan prasarannya	1 RSUD	3.000.000.000,00	Jumlah RSUD mendapat pembangunan beserta sarana dan prasarannya	1 RSUD	826.526.000,00

1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah pengembangan puskesmas	1 paket	50.000.000,00	Jumlah pengembangan puskesmas	1 paket	50.000.000,00
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan posyandu, poskeskel, pustu, dan faskes lainnya	1 paket	1.000.000,00	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan posyandu, poskeskel, pustu, dan faskes lainnya	1 paket	-
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	20 paket	2.484.106.000,00	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	20 paket	2.484.106.000,00
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	100 unit	120.000.000,00	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	100 unit	83.850.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	3.859.058.600,00	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	3.851.475.820,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	3 jenis	591.354.000,00	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	3 jenis	591.354.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 persen	33.733.423.950,00	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 persen	31.057.965.300,00
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 persen	50.000.000,00	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 persen	44.750.000,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100 persen	124.815.000,00	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100 persen	124.815.000,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 persen	30.000.000,00	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 persen	18.900.000,00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 persen	50.000.000,00	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 persen	50.000.000,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	41.428.800,00	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	31.170.800,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persen	25.000.000,00	Persentase orang usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persen	22.885.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persen	42.000.000,00	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persen	38.310.000,00

1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	140.000.000,00	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	140.000.000,00	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	40.000.000,00	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	28.000.000,00	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	40.000.000,00	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen	34.999.800,00	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 persen	151.278.450,00	Presentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 persen	136.150.600,00	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 persen	40.000.000,00	Persentase orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 persen	30.915.000,00	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	22 kelurahan	117.353.000,00	Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	22 kelurahan	98.807.000,00	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat pembinaan kesjaor	40 unit	20.000.000,00	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat pembinaan kesjaor	40 unit	18.050.000,00	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM	22 kelurahan	67.890.000,00	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM	22 kelurahan	61.248.000,00	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan mendapat pelayanan promosi kesehatan	22 kelurahan	100.000.000,00	Jumlah kelurahan mendapat pelayanan promosi kesehatan	22 kelurahan	90.000.000,00	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kelurahan UCI	22 kelurahan	90.000.000,00	Jumlah kelurahan UCI	22 kelurahan	76.000.000,00	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah kecamatan mendapat pelayanan pelayanan Public Safety Center	5 kecamatan	105.000.000,00	Jumlah kecamatan mendapat pelayanan pelayanan Public Safety Center	5 kecamatan	89.200.500,00	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat peserta PBI JKN mendapat bantuan iuran	52085 orang	21.264.000.000,00	Jumlah masyarakat peserta PBI JKN mendapat bantuan iuran	52085 orang	19.442.221.600,00	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen kota sehat	1 dokumen	48.034.700,00	Jumlah dokumen kota sehat	1 dokumen	22.918.000,00	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	2.162.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	1.474.000.000,00	

					RSUD Jend. A Yani	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	162.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	-
					RSUD Sumber Sari Bantul	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	2.000.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	1.474.000.000,00
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	8.428.500.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	8.428.500.000,00
					Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	644.237.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	644.237.000,00
					Puskesmas Metro	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	849.416.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	849.416.000,00
					Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	879.143.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	879.143.000,00
					Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	711.597.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	711.597.000,00
					Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	881.111.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	881.111.000,00
					Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	578.451.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	578.451.000,00
					Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	610.727.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	610.727.000,00
					Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	628.903.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	628.903.000,00
					Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	558.770.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	558.770.000,00
					Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	569.895.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	569.895.000,00
					Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	753.869.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	753.869.000,00
					Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang operasional pelayanannya terpenuhi	11 puskesmas	762.381.000,00	Jumlah puskesmas yang operasional pelayanannya terpenuhi	11 puskesmas	762.381.000,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	110.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	110.000.000,00
					Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
					Puskesmas Metro	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
					Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
					Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
					Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
					Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00

				Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
				Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
				Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
				Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
				Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1 02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melakukan reakreditasi	9 puskesmas	446.124.000,00	Jumlah puskesmas yang melakukan reakreditasi	9 puskesmas	446.124.000,00
1 02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	2 dokumen	128.871.000,00	Jumlah dokumen informasi kesehatan	2 dokumen	121.671.000,00
1 02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki data dan informasi kesehatan terintegrasi	11 puskesmas	75.000.000,00	Jumlah puskesmas yang memiliki data dan informasi kesehatan terintegrasi	11 puskesmas	75.000.000,00
1 02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapat monitoring pemanfaatan sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	53.871.000,00	Jumlah puskesmas yang mendapat monitoring pemanfaatan sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	46.671.000,00
1 02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	100 persen	444.797.100,00	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	100 persen	462.377.100,00
1 02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dan fasyankes swasta yang mendapat pembinaan	30 sarana	355.297.100,00	Jumlah puskesmas dan fasyankes swasta yang mendapat pembinaan	30 sarana	382.337.100,00
1 02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu	40 sarana	24.500.000,00	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu	40 sarana	15.190.000,00
1 02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disurvei lapangan untuk sistem rujukan	12 sarana	65.000.000,00	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disurvei lapangan untuk sistem rujukan	12 sarana	64.850.000,00
1 02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	92 persen	110.000.000,00	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	92 persen	98.974.600,00
1 02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	11 puskesmas	60.000.000,00	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	11 puskesmas	50.281.000,00
1 02	03	2.02	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan SDMK	2 dokumen	34.236.800,00	Jumlah dokumen perencanaan SDMK	2 dokumen	24.517.800,00

1 02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDMk yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 orang	25.763.200,00	Jumlah SDMk yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 orang	25.763.200,00
1 02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100 persen	50.000.000,00	Cakupan terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100 persen	48.693.600,00
1 02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	30 orang	50.000.000,00	Jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	30 orang	48.693.600,00
1 02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 persen	135.000.000,00	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 persen	226.450.700,00
1 02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	100 persen	105.000.000,00	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	100 persen	199.450.700,00
1 02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PI-RT	80 IRT	105.000.000,00	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PI-RT	80 IRT	199.450.700,00
1 02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100 persen	30.000.000,00	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100 persen	27.000.000,00
1 02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sarana yang mendapat pengawasan obat dan makanan	30 sarana	30.000.000,00	Jumlah sarana yang mendapat pengawasan obat dan makanan	30 sarana	27.000.000,00
1 02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,27	1.851.109.940,00	Indeks Keluarga Sehat	0,27	1.843.049.940,00
1 02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100 persen	419.509.940,00	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100 persen	415.509.940,00
1 02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	22 kelurahan	419.509.940,00	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	22 kelurahan	415.509.940,00
1 02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	22 kelurahan	40.600.000,00	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	22 kelurahan	36.540.000,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KOTA METRO

TAHUN 2022

No	Tujuan	Indikator tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN)	90,0%	99,41 %	110,5 %
				Angka Harapan Hidup	71,90	71,88	99,9 %
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3	0	100%
				Jumlah kasus kematian bayi	11	13	84,61 %
				Prevalensi stunting pada anak balita	9,5%	6,67%	142 %
				Angka keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	95%	100 %	105 %
				Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	92%	92 %
			Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%	100 %	103 %
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,27 (tidak sehat)	0,376	139 %

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METROdrg. Erla Andrianti, MARS
NIP. 19650902 199203 2 005

**RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2022**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	angka	71,9	-	-	-	71,9	Rp 272.941.136.374
			Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	90	22,5	22,5	22,5	22,5	
			Jumlah kasus kematian ibu	kasus	3	-	1	1	1	
			Jumlah kasus kematian bayi	kasus	11	2	3	3	3	
			Prevalensi stunting pada anak balita	%	9,5	2,38	2,38	2,38	2,37	
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	%	95	23,75	23,75	23,75	23,75	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 58.911.144.776
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	12	6	2	2	2	Rp 146.974.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 57.758.768.359
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 343.577.400
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 249.515.500
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 146.999.517
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang-barang milik daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 265.310.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan		Jumlah kasus kematian neonatal	kasus	9	2	2	2	3	Rp 211.933.881.658
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	12	3	3	3	3	
			Persentase balita wasting	%	5,8	1,45	1,45	1,45	1,45	
			Persentase Ibu hamil KEK	%	14	3,5	3,5	3,5	3,5	
			Persentase anemia pada ibu hamil	%	19	4,75	4,75	4,75	4,75	

Masyarakat		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	25	25	25	25	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	23,75	23,75	23,75	23,75	
		Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunisation)	%	100	25	25	25	25	
		Insiden Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	214,3	53,58	53,58	53,57	53,57	
		Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	%	12,99	3,25	3,25	3,25	3,24	
		Angka kesakitan (incidence rate) DBD	per 100.000 penduduk	71,63	17,91	17,91	17,91	17,9	
		Prevalensi HIV AIDS	%	0,014	0,035	0,035	0,035	0,035	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	%	58	14,5	14,5	14,5	14,5	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan	12	3	3	3	3	Rp 10.105.518.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 201.254.694.958
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	dokumen	2	-	1	-	1	Rp 128.871.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	%	100	25	25	25	25	Rp 444.797.100
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	92	23	23	23	23	Rp 110.000.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas	11	2	3	3	3	Rp 60.000.000
Program Sediaan Farmasi, Alat	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 50.000.000
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	92	23	23	23	23	Rp 135.000.000

Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 105.000.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 30.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Indeks Keluarga Sehat	angka	0,27	-	-	-	0,27	Rp 1.851.109.940
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	%	100	25	25	25	25	Rp 419.509.940
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	kelurahan	22	5	5	6	6	Rp 40.600.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengembangan dan pelaksanaan UKBM	%	100	25	25	25	25	Rp 1.391.000.000

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO



drg. ERLA ANDRIANTI, MARS

NIP. 19650902 199203 2 005

**MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2022**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI TARGET KINERJA	% CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
						1	2	3	4		1	2	3	4						
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	angka	71,9	-	-	-	71,9	Rp 272.941.136.374	-	-	-	-	71,88	100%	-	-	-	-
			Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	90	22,5	22,5	22,5	22,5		v	v	v	v	99,41%	110,50%	17.517.441.662	90,10%	-	-
			Jumlah kasus kematian Ibu	kasus	3	-	1	1	1		v	v	v	v	0	100%	260.600.000	99,97%	-	-
			Jumlah kasus kematian bayi	kasus	11	2	3	3	3		v	v	v	v	13	85%	172.964.357	84,08%	-	-
			Prevalensi stunting pada anak balita	%	9,5	2,38	2,38	2,38	2,37		v	v	v	v	6,67%	142%	772.736.207	90,96%	-	-
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	%	95	23,75	23,75	23,75	23,75		v	v	v	v	100%	105%	125.770.650	92,38%	-	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 58.911.144.776	v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	6	2	2	2	Rp 128.674.000	v	v	v	v	100%	100%	Rp 127.993.630	99%	-	-
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	25	25	25	Rp 45.474.000	v	v	v	v	100%	100%	Rp 44.917.070	99%	-	-
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	25	25	25	Rp 243.182.700	v	v	v	v	100%	100%	Rp 240.821.000	99%	-	-
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	3	3	3	Rp 234.143.000	v	v	v	v	100%	100%	Rp 233.739.531	99%	-	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	3	3	3	Rp 171.099.517	v	v	v	v	100%	100%	Rp 155.382.367	95%	-	-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang-barang milik daerah	bulan	12	3	3	3	Rp 272.310.000	v	v	v	v	100%	100%	Rp 242.840.802	78%	-	-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Jumlah kasus kematian neonatal	kasus	9	2	2	2	3	Rp 21.193.388.165	v	v	v	v	100%	100%	Rp 20.769.520.402	98%	-	-
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	12	3	3	3	3		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Persentase balita wasting	%	5,8	1,45	1,45	1,45	1,45		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Persentase ibu hamil KEK	%	14	3,5	3,5	3,5	3,5		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Persentase anemia pada ibu hamil	%	19	4,75	4,75	4,75	4,75		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	25	25	25	25		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	23,75	23,75	23,75	23,75		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Cakupan Keluarahan UCI (Universal Child Immunisation)	%	100	25	25	25	25		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Insiden Tuberkulosis	per 100.000 pddk	214,3	53,58	53,58	53,57	53,57		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	%	12,99	3,25	3,25	3,25	3,24		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Angka kesakitan (incidence rate) DBD	per 100.000	71,63	17,91	17,91	17,91	17,9		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Prevalensi HIV AIDS	%	0,014	0,035	0,035	0,035	0,035		v	v	v	v	100%	100%			-	-
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	%	58	14,5	14,5	14,5	14,5		v	v	v	v	100%	100%			-	-

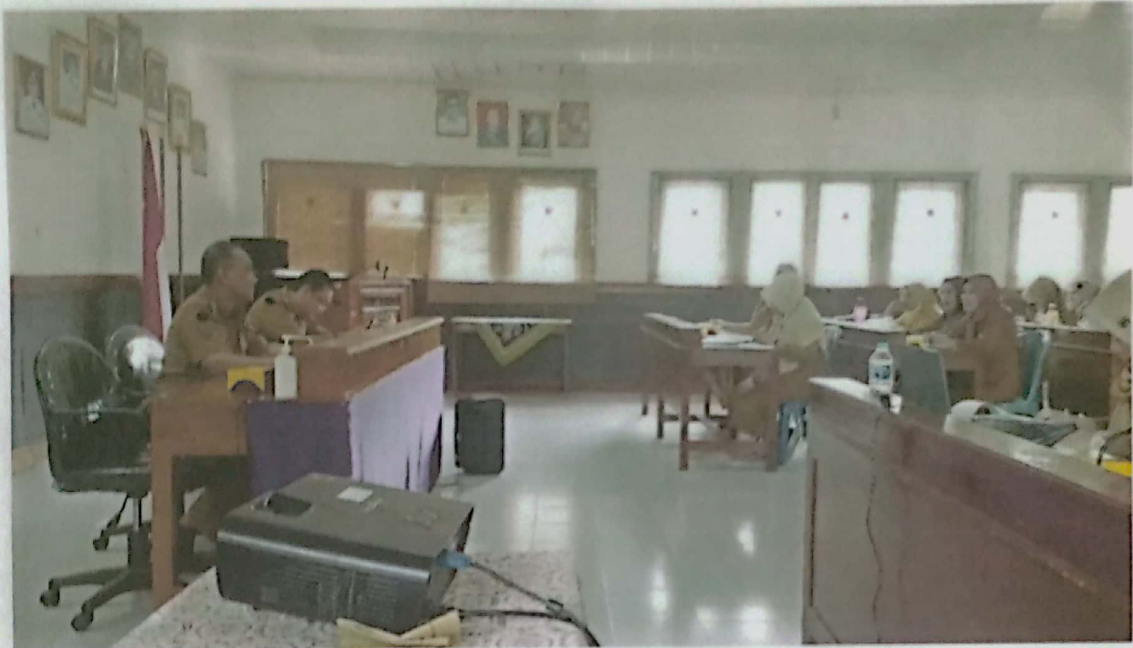
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan	12	3	3	3	3	Rp 7.887.311.820	v	v	v	v	100%	100%	7.591.891.483,50	98%	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 31.057.965.300	v	v	v	v	100%	100%	27.925.229.090	89%	-	-
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	dokumen	2	-	1	-	1	Rp 121.671.000	v	v	v	v	100%	100%	117.993.608	96%	-	-
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	%	100	25	25	25	25	Rp 462.377.100	v	v	v	v	100%	100%	460.617.980	99%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	92	23	23	23	23	Rp 110.000.000	v	v	v	v	100%	100%	50.281.000	100%	-	-
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas	11	2	3	3	3	Rp 50.281.000	v	v	v	v	100%	100%	49.921.000	99%	-	-
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 48.693.600	v	v	v	v	100%	100%	48.693.200	100%	-	-
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	92	23	23	23	23	Rp 135.000.000	v	v	v	v	100%	100%	2.990.837.000	98,90%	-	-
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 199.450.700	v	v	v	v	100%	100%	187.570.700	94%	-	-
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 27.000.000	v	v	v	v	100%	100%	26.863.700	99%	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Indeks Keluarga Sehat	angka	0,27	-	-	-	0,27	Rp 1.851.109.940	v	v	v	v	100%	139%	45.606.000	100%	-	-
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Untas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	%	100	25	25	25	25	Rp 415.509.940	v	v	v	v	100%	100%	415.287.100	100%	-	-
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	kelurahan	22	5	5	6	6	Rp 36.540.000	v	v	v	v	100%	100%	28.843.000	79%	-	-
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengembangan dan pelaksanaan UKBM	%	100	25	25	25	25	Rp 1.391.000.000	v	v	v	v	100%	100%	1.390.952.000	100%	-	-



MONITORING EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2022



MONITORING EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA METRO
TAHUN 2022





PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 02 Metro, Kode Pos 34111
Telp. (0725) 44454, dinkeskotametro1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO
NOMOR : 93 /KPTS/D-02/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO,

Menimbang : a. dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022, perlu membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang akan mengevaluasi dan mengelola langkah-langkah perbaikan, dan pembenahan SAKIP pada Dinas Kesehatan Kota Metro;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya dati II Metro;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kota Metro;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah :

1. Ketua :
 - Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya melakukan evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro;
2. Sekretaris :
 - Memberikan arahan dan Petunjuk secara teknis tata cara pelaksanaan Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro;
3. Anggota :
 - Melakukan koordinasi dan mobilitas anggota tim untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - Menerima dan mengumpulkan bahan/data untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - Menyerahkan data/bahan Evaluasi SAKIP yang terkumpul kepada Sekretaris TIM.

KETIGA : Tim Evaluasi SAKIP dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,



ERLA ANDRIANTI

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Nomor : 93 /KPTS/D-02/01/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA METRO**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan
Hubungan Masyarakat
Anggota :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Shinta Marvina Darmawan, SKM
6. Denia Pramudiah A, S.Gz
7. Novian Dwi Hetrianto, A.Md.Kes
8. Muhammad Rafiq

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO,

ERLA ANDRIANTI



PEMERINTAH KOTA METRO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DINAS KESEHATAN KOTA METRO



DINAS KESEHATAN
KOTA METRO

<div></div> <div>DINAS KESEHATAN</div> <div>KOTA METRO</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2022
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2022
	Disahkan Oleh	<div></div> <div><u>drg.ERLA ANDRIANTI, MARS</u> NIP. 19650902-199203 2 005</div>	
Nama SOP	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</div> <div>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</div> <div>3. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah;</div> <div>5. Peraturan Walikota Metro No. 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro</div>	<div>1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)</div> <div>2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.</div>		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
<div>1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)</div> <div>2. SOP Penyusunan Pencana Kerja (Renja)</div> <div>3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja</div> <div>4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja</div>	<div>1. Renstra OPD</div> <div>2. Format penyusunan SAKIP</div> <div>3. Dokumen Perjanjian Kinerja</div> <div>4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD</div> <div>5. Laporan Realisasi Keuangan dan Perangkat Komputer</div>		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
<div>1. Rumusan rencana program kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan untuk periode 1 tahunan anggaran.</div> <div>2. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP tidak akan berjalan lancar.</div>	Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy		

SOP : PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

No .	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ka. Sub.bag Perencanaan	Tim Sakip	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Out Put	
1.	Memerintahkan penyusunan Sakip	Mulai					Disposisi Surat	10 Menit	Diposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan Sakip	2 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepadamasing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan Sakip	1 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Penyusunan Sakip	3 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul						Format Penyusunan Sakip	4 Hari	Format Penyusunan Sakip	-
6.	Membuat konsep Dokumen SAKIP dan mengajukan kepada Kepala Dinas						Draf SAKIP	2 Hari	Draf SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
7.	Mengoreksi konsep Dokumen SAKIP						Dokumen SAKIP	1 Hari	Dokumen SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
8.	Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Kepala Dinas kemudian diteruskan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian						Dokumen SAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen Sakip	Konsep Sakip
9.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamatyang dituju						Konsep Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar	Dokumen Sakip

No .	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Ka. Sub.bag Perencanaan	Tim Sakip	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	waktu	Out Put	Keterangan
10.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP					<div>↓ selesai</div>	Dokumen SAKIP	1 jam	Dokumen Sakip	-

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro



drg. ERLA ANDRIANTI, MARS
NIP. 19650902 199203 2 005



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN KOTA METRO

Jl. Ahmad Yani No. 02 Telp. (0725) 44454
Metro

Nomor SOP : 050/82/ D-2.01/2020

Tanggal Pembuatan : 07 Januari 2020

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan : 07 Januari 2020

Disahkan Oleh



Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI RENJA DAN IKU

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Pelaksana Subbag
4. Operator Komputer, Pengadministrasi umum, dan pengaplikasi program
5. Instansi terkait

KETERKAITAN :

1. SOP RENJA

PERALATAN/KELENGKAPAN :

1. DISPOSISI
2. RENJA

PERINGATAN :

Apabila Monitoring dan Evaluasi Renja tidak disusun maka realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Metro tidak terpantau

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. SUB. BAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS

DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI RENJA

NO	URAIAN PRODUSEN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris	Pelaksana Sub. Bag	Operator Komputer, Pengadminist rasi umum, pengaplikasi program	Instansi Terkait	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menugaskan Sekretaris untuk melakukan penyusunan Monitoring dan Evaluasi Renja	Mulai					> DISPOSISI Renja	15 menit	disposisi	
2	menugaskan kasubag perencanaan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Renja		membuat nota dinas				Disposisi Monev Renja	15 Menit	15 Menit	
3	Koordinasi dengan bidang-bidang untuk mengisi data			koordi nasi		koordi nasi	Formulir	7 hari	Laporan	
4	Menyusun Monitoring dan Evaluasi Renja			penyusunan		penyusunan	Formulir	2 hari	Laporan	
5	Mengoreksi Draf		koreksi				draft laporan	1 hari	draft laporan	
6	Menyetujui Kadis melalui sekretaris	acc					draft laporan	1 hari	Laporan	
7	Mengarsipkan laporan			arsip		selesai	Laporan	1 hari	Laporan	



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. A. Yani No. 02 Kota Metro

Email: dinkeskotametro1@gmail.com Website: www.dinkes.metrokota.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI INTERNAL LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

Pada Hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Telah diadakan rapat Evaluasi Internal terkait LAKIP Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022, dengan hasil pembahasan :

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022

NO INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET
1. Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90,0%	99,41%	110,5%	
2. Angka Harapan Hidup	71,90	71,88	99,9%	
3. Jumlah kasus kematian ibu	3 kasus	0 kasus	0	Tidak ada kasus kematian ibu
4. Jumlah kasus kematian bayi	11 kasus	13 kasus	84,61%	
5. Prevalensi stunting pada anak balita	9,5%	6,67%	142%	
6. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis (succesrate)	95%	100%	105%	
7. Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	92%	92 %	100%	
8. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%	100%	103%	

9. Indeks Keluarga Sehat	0.27	0.376	139%
--------------------------	------	-------	------

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 9 indikator terdapat 5 indikator yang sudah melebihi target 100% dan 4 indikator dengan rentang capaian 75%-100%.

Demikianlah berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang SDK,



SABARINA AMIR, S.Farm., Apt
NIP. 19850705 201001 2 016

Kepala Bidang P2P,



VERAWATI NASUTION, SKM., M.Kes
NIP.19800801 200003 2 002

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan



HENDARTO, SKM., M.Kes
NIP. 19770114 199602 1 001

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat,



DIAH MEIRAWATI, SKM., M.Kes
NIP.19800504 200312 2 003

SEKRETARIS,





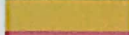

dr. ACMAD REDHO AKBAR
NIP. 19760411 200604 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro



Dr. EKO HENDRO SAPUTRA, ST., M. Kes
NIP. 19670520 199402 1 002

Keterangan :

Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode Warna
Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	
Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	
55% s.d 75%	Cukup (C)	
Kurang dari 55%	Kurang (K)	

**DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
YANG DIRAIH KOTA METRO
TAHUN 2021-2022**

OPD: DINAS KESEHATAN KOTA METRO

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Penerimaan (Tahun)
1	Penghargaan STBM berkelanjutan Tahun 2021	KEMENKES RI	2022
2	Penghargaan STBM berkelanjutan Tahun 2021	KEMENKES RI	2022
3	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Kefarmasian atas nama Apt. MERIA SUSI, S.Si	Provinsi Lampung	2022
4	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Rumah Sakit Pemerintah Daerah atas nama Ns. Nurdyanto, S.Kep	Provinsi Lampung	2022
5	Juara II Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Dokter Umum atas nama dr. Finalita Wulandari	Provinsi Lampung	2022
6	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Dokter Gigi atas nama drg. Herman Fadli Harahap	Provinsi Lampung	2022
7	Juara III Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Gizi atas nama Dewi Nurhayu, SKM	Provinsi Lampung	2022
8	Juara II Tenaga Kesehatan Teladan Kategori ATLM atas nama Kanti Rahayu, A.Md.A.K	Provinsi Lampung	2022
9	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Kesehatan Lingkungan atas nama Nurvita, A.Md.KL	Provinsi Lampung	2022
10	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Bidan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atas nama Dianawati, S.ST	Provinsi Lampung	2022
11	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Kefarmasian atas nama Apt. MERIA SUSI, S.Si	KEMENKES RI	2022

No.	Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Penerimaan (Tahun)
12	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Perawat Rumah Sakit Pemerintah Daerah atas nama Ns. Nurdlyanto, S.Kep	KEMENKES RI	2022
13	Penilaian Kapasitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) pada 3 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	2022
14	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Perawat atas nama Andin Atmini, S.Kep.,Ns	Provinsi Lampung	2021
15	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Bidan atas nama Trimawati, S.ST	Provinsi Lampung	2021
16	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Ahli teknologi Lab Medic atas nama Surtini, S.ST	Provinsi Lampung	2021
17	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Dokter atas nama dr. Ria Putriono	Provinsi Lampung	2021
18	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Perawat atas nama Andin Atmini, S.Kep.,Ns	KEMENKES RI	2021
19	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Bidan atas nama Trimawati, S.ST	KEMENKES RI	2021
20	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Ahli teknologi Lab Medic atas nama Surtini, S.ST	KEMENKES RI	2021
21	Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Kategori Dokter atas nama dr. Ria Putriono	KEMENKES RI	2021





Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Metro Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN / PROSA / KESALINAN	INDIKATOR	TARGET OUTPUT KINERJA (Sasaran)	REALISASI 2022	%	TARGET KINERJA 2022	PAGU ANGGARAN	TARGET (Rp)	JADWAL PELAKSANA (BULAN/TW)				REALISASI TARGET KINERJA	%CAPAIAN REALISASI TARGET	REALISASI TARGET ANGGARAN	%CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	KENDALA	TINDAK LANJUT																																																																																																																																																							
											1	2	3	4																																																																																																																																																													
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																																																																																																																								
																				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																																																																																																					
																																							Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																																																																																		
																																																										Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																																																															
																																																																													Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																																												
																																																																																																Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																																									
																																																																																																																			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																																						
																																																																																																																																						Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-																			
																																																																																																																																																									Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Persentase penduduk umur 0-4 tahun dengan status gizi kurang	80%	99,41%	110,5%	45000 jiwa	19.442.221.600	19.442.221.600	V	V	V	V	44734 jiwa	99,41%	17.517.441.682	90,1%	-	-